

KEUANGAN

Teken 939 Kesepakatan

BADAN Pemeriksan Keuangan RI menandatangani nota kesepahaman dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota se Kalbar, Kamis (16/6) pagi. Nota kesepahaman tersebut tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.



Adi Sudiby

Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Kalbar, Adi Sudiby dengan pimpinan pemerintah daerah

di Aula Kantor BPK RI. Disaksikan Ketua BPK RI, Hadi Poernomo, Anggota I BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara, Gubernur Kalbar Cornelis, pimpinan DPRD, pimpinan instansi vertikal di Kalbar, dan pejabat di lingkungan BPK RI.

Teken 939 Kesepakatan

Sambungan dari halaman 9

Kepala Perwakilan BPK RI Kalbar, Adi Sudiby mengatakan dengan penandatanganan nota kesepahaman tersebut, BPK RI telah menandatangani 939 nota kesepahaman. "Termasuk diantaranya 412 nota kesepahaman tentang pengembangan dan pengelolaan informasi untuk akses data" ujar Adi sebelum kegiatan penandatanganan kemarin.

Nota kesepahaman ini lebih mengatur tata cara akses data terkait pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Penandatungannya merupakan langkah strategis mewujudkan

sinergi antara BPK RI dengan para pemangku kepentingan, termasuk diantaranya dengan BUMN. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK RI mendapat kewenangan meminta data atau dokumen kepada pihak yang diperiksa (auditee) dan/atau pihak lain yang terkait. Untuk mempermudah perolehan data/dokumen, BPK RI memprakarsai pembentukan pusat data dengan auditee melalui strategi link and match. Melalui nota kesepahaman ini, selanjutnya dibentuk pusat data BPK RI dengan menggabungkan data elektronik BPK RI (E-BPK) dengan data

elektronik auditee (E-Auditee). Melalui pusat data tersebut, BPK RI dapat melakukan perekaman, pengolahan, pemanfaatan, dan monitoring data yang bersumber dari berbagai pihak untuk pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan cara ini, monitoring keuangan negara akan semakin kuat dan pemeriksaan BPK RI akan semakin efisien dan efektif.

Menurut Adi, BPK RI mengharapkan melalui monitoring tersebut akan mengurangi KKN secara sistemik, mendukung optimalisasi penerimaan negara, mendukung efisiensi dan efektifitas pengeluaran negara. (uni)